

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1. Teori Agency

Jensen dan Meckling (1976) dan Puspita dan Martani (2012) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agent, sehingga prinsipal tidak selamanya mengikuti keinginan agent. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di Pemerintahan antara pemerintah sebagai agen dan rakyat sebagai prinsipal. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah, dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency cost*. Dalam konsepsi pemberian informasi melalui internet kepada publik dapat dijadikan alat untuk mengurangi konflik keagenan.

2.1.2. E-Government

E-government adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan pemerintah dengan

tujuan mencapai *good governance*. *E-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, ataupun administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis (dalam Dewi, 2013).

Sedangkan, *The World Bank Group* mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut: “*e-Government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *Wide Area Network*, Internet dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga Negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.” (*The World Bank Group*, 2001). UNDP (*United Nation Development Programme*) juga memberikan definisi tersendiri dengan lebih singkat untuk *E-Government* : “*E-Government* adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (*ICT*) dari agen pemerintah (dalam Dewi, 2013)

2.1.3. Good Governance

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* memberikan definisi governance sebagai “*the way power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sementara itu, *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at al levels*”. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada

cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2.1.4. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut :“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

2.1.5. Pengungkapan

Pengungkapan menyangkut:

1. Untuk siapa informasi diungkapkan

Kerangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan sehingga pengungkapan ditujukan terutama untuk mereka. Pengungkapan menuntut lebih dari sekedar pelaporan keuangan tetapi meliputi pula penyampaian informasi kualitatif dan non kualitatif.

2. Tujuan Pengungkapan

Tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Hal yang berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi yang harus diungkap disebut dengan tingkat pengungkapan (*level disclosure*). Evan, dalam Suwardjono, (2005) mengidentifikasi tiga konsep pengungkapan adalah pengungkapan yang memadai (*adequacy*), wajar (*fair*) dan lengkap (*full*).

3. Keluasan dan Kerincian Pengungkapan

Pengungkapan yang memadai menyiratkan jumlah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi sesuai dengan tujuan pembuatan laporan keuangan yang tidak menyesatkan untuk pengambilan keputusan yang diarah. Pengungkapan yang wajar menyiratkan suatu tujuan etika yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon pembaca. Pengungkapan lengkap menyiratkan penyajian seluruh informasi yang relevan.

4. Cara dan waktu mengungkapkan informasi

Penyampaian informasi selain disampaikan melalui laporan keuangan dapat juga disampaikan melalui media lain dalam bentuk finansial maupun non finansial. Informasi yang bersifat finansial dapat mengambil bentuk laporan tahunan, prospektus, laporan analisis dan sejenisnya. Sedangkan yang bersifat non finansial antara lain jumpa pers tentang produk baru, rencana perluasan, rencana peningkatan kesejahteraan karyawan dan sebagainya (FASB, SFAC No.5, par 7 dalam Sutomo, (2004)). Mengingat pentingnya pelaporan keuangan tersebut dan agar pelaporan keuangan dapat diinterpretasikan secara tepat, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan maka pelaporan keuangan tersebut harus disusun sesuai standar yang berlaku. Alasan yang mendasari perlunya praktik pengungkapan pelaporan keuangan oleh manajemen kepada pemilik adalah hubungan antara *principal* dengan *agent*.

Secara sederhana pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya. Oleh karena itu pelaporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang memadai. Pengungkapan yang dimaksud dapat berupa kebijakan akuntansi, jumlah saham yang beredar, harga saham perusahaan dan ukuran-ukuran alternatif lain (Cahyani, 2009).

2.1.6. Website

Menurut Wikipedia (2013) situs web (bahasa Inggris: *web site*) atau sering disingkat dengan istilah situs adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL. Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di internet disebut pula sebagai Waring Wera Wanua atau lebih dikenal dengan singkatan WWW. Meskipun setidaknya halaman beranda situs internet umumnya dapat diakses publik secara bebas, pada prakteknya tidak semua situs memberikan kebebasan bagi publik untuk mengaksesnya, beberapa situs web mewajibkan pengunjung untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota, atau bahkan

meminta pembayaran untuk dapat menjadi anggota untuk dapat mengakses isi yang terdapat dalam situs web tersebut, misalnya situs-situs yang menampilkan pornografi, situs-situs berita, layanan surel (e-mail), dan lain-lain. Pembatasan-pembatasan ini umumnya dilakukan karena alasan keamanan, menghormati privasi, atau karena tujuan komersil tertentu.

Sebuah halaman web merupakan berkas yang ditulis sebagai berkas teks biasa (plain text) yang diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan instruksi-instruksi berbasis HTML, atau XHTML, kadang-kadang pula disisipi dengan sekelumit bahasa skrip. Berkas tersebut kemudian diterjemahkan oleh peramban web dan ditampilkan seperti layaknya sebuah halaman pada monitor komputer. Halaman-halaman web tersebut diakses oleh pengguna melalui protokol komunikasi jaringan yang disebut sebagai HTTP, sebagai tambahan untuk meningkatkan aspek keamanan dan aspek privasi yang lebih baik, situs web dapat pula mengimplementasikan mekanisme pengaksesan melalui protokol HTTPS.

2.1.7. Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya (Mahsun dkk, 2012). Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002 dalam Mahsun dkk, 2012).

Mandell (1997) dalam Sumarjo (2010) mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut (Hamzah, 2008 dalam Sumarjo, 2010).

2.1.8. Karakteristik

Karakteristik berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu (Syafitri, 2012). Lesmana (2010) dalam Syafitri

(2012) mengatakan bahwa karakteristik pemerintah daerah bersifat khas dari otoritas administratif pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat menggambarkan karakteristik pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan suatu alat yang memfasilitasi transparansi akuntabilitas publik, yang menyediakan informasi yang relevan mengenai kegiatan operasionalnya, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan atas pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Suhardjanto dan Miranti (2009) dalam Sumarjo (2010) pada sektor swasta mendefinisikan karakteristik perusahaan sebagai ciri-ciri khusus yang melekat pada perusahaan, menandai sebuah perusahaan dan membedakannya dengan perusahaan lain.

2.1.9. Pendapatan Asli Daerah

Yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. 29 Tahun 1999).

2.1.10. Dana Alokasi Umum

Intergovernmental revenue adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program daerah (Nam, 2001 dalam Sumarjo, 2010). Transfer tersebut lebih dikenal di Indonesia sebagai dana perimbangan (Suhardjanto et.al, 2010 dalam Sumarjo, 2010). Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Wikipedia (2013) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk daerah Provinsi
2. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota

Jumlah DAU setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah.

Robin dan Austin (1987) dalam Puspita (2012) memaparkan bahwa *intergovernmental revenue* (DAU) merepresentasikan tingkat ketergantungan Pemda. Tingkat ketergantungan Pemda dapat diukur menggunakan Rasio Ketergantungan. Rasio ketergantungan menunjukkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Rasio ini adalah perbandingan antara Dana alokasi umum dengan total realisasi anggaran pendapatan.

2.1.11. Ukuran Pemerintah Daerah

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Ukuran pemerintah daerah adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi (Patrick, 2007 dalam Sumarjo (2010). Kabupaten/Kota dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya. Konsekuensinya, pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya (Suhardjanto et al., 2010 dalam Sumarjo 2010). Oleh karena itu, pemerintah daerah tersebut akan menaruh perhatian yang lebih tinggi dalam pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi (Patrick, 2007; Cohen dan Kaimenakis, 2008, dalam Sumarjo 2010).

2.1.12. Kompleksitas Pemerintahan

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, jumlah penduduk mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik setiap daerah. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah maka diikuti dengan penyediaan layanan publik yang semakin besar pula, dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk mengungkapkan segala sesuatu informasi mengenai daerahnya kepada masyarakat.

Ingram (1984) dalam Puspita (2012) memaparkan bahwa variabel kompleksitas pemerintahan (yang diproksi dengan jumlah penduduk) memberikan dorongan kepada Pemda untuk meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya.

2.1.13. Belanja Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

2.2. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Puspita dan Martani (2012)	Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam <i>Website</i> Pemda	<p>Variabel Independen: Rasio PAD, Rasio Ketergantungan, Ukuran Pemda, Kompleksitas Pemerintahan, Belanja Daerah</p> <p>Variabel Dependen: Pengungkapan dalam <i>Website</i> Pemda</p>	Rasio PAD, Kompleksitas Pemerintahan, dan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Dalam <i>Website</i> Pemda, sedangkan Rasio Ketergantungan dan Ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap Pengungkapan dalam <i>Website</i> Pemda.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Sumarjo (2010)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: ukuran (<i>size</i>) pemerintah daerah, kemakmuran (<i>wealth</i>) pemerintah daerah, ukuran legislatif, <i>leverage</i> , <i>Intergovernmental revenue</i> ,	Ukuran (<i>size</i>) pemerintah daerah, <i>leverage</i> , dan <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan kemakmuran (<i>wealth</i>) dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Variabel Dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah	
3.	Afryansyah (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet oleh Pemerintah Daerah	Variabel Independen: Jumlah penduduk, tingkat investasi, Kompetisi politik, kekayaan daerah, <i>press visibility</i> . Variabel Dependen: Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet	Variabel <i>press visibility</i> mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di <i>internet</i> secara sukarela oleh pemerintah daerah, sedangkan variabel jumlah penduduk, tingkat investasi, kekayaan daerah dan kompetisi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				tingkat pengungkapan informasi akuntansi di <i>internet</i> secara sukarela oleh pemerintah daerah.
4.	Syafitri (2012)	Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan	Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Jumlah anggota DPRD, Umur administratif Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah,	Umur administratif pemerintah daerah, Kekayaan pemerintah daerah dan Ukuran legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD sedangkan <i>intergovernmental revenue</i> memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD dan Variabel lainnya LKPD.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Jumlah SKPD, Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Pembiayaan Utang dan <i>Intergovernmental revenue</i> Variabel Dependen: Tingkat pengungkapan wajib	Variabel independen lainnya, yaitu ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, pembiayaan utang dan rasio kemandirian keuangan daerah tidak terbukti mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2008-2009.

2.3. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.3.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. 29 Tahun 1999).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan seberapa besarkah Pemda dapat menggali sumber pendapatan yang berpotensi pada daerahnya. PAD menunjukkan kinerja daerah untuk menghasilkan pendapatannya secara mandiri. Pemda yang memiliki PAD tinggi akan menunjukkan kepada para *stakeholdernya* bahwa Pemda telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Kinerja yang tinggi merupakan sinyal dari manajemen publik yang baik (Christiaensens, 1999 dalam Puspita dan Martani, 2012). Pemda yang memiliki kinerja yang tinggi akan mengungkapkan informasi mengenai daerahnya pada website yang dimilikinya.

H₁ : Rasio PAD berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada website Pemda.

2.3.2. Tingkat Ketergantungan

Pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus kepada setiap pemerintah daerah. Pemerintah pusat memantau

bagaimana penggunaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus oleh pemerintah daerah dan melihat kinerja pemerintah daerah atas dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang telah diberikan.

Semakin tinggi DAU yang diterima Pemda, menunjukkan tingkat ketergantungan yang besar terhadap sumber dana lain untuk membiayai aparatnya. Pemda yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber dana Pemerintah Pusat, maka Pemda tersebut juga memiliki tekanan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak (Liestiani 2008, dalam Puspita dan Martani, 2012). Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Martani (2012) menunjukkan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam *website* pemda.

H₂ : Rasio Ketergantungan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pada website Pemda.

2.3.3. Ukuran Pemda

Laswad et.al. (2005) dalam Puspita dan Martani (2010) menghubungkan kinerja terhadap *internet financial reporting* dengan ukuran Pemda. Ukuran Pemda digambarkan dengan seberapa besar aset yang dimiliki oleh Pemda. Besarnya aset yang dimiliki Pemda akan menggambarkan seberapa besar ukuran Pemda tersebut.

Semakin besar aset yang dimiliki Pemda, semakin besar ukuran Pemda tersebut, maka semakin besar pula pertanggungjawaban atas aset yang dikelola pemda tersebut sudah digunakan dengan baik demi

menunjang kepentingan, pelayanan, dan kebutuhan masyarakat. Semakin besar pertanggungjawaban tersebut maka semakin besar pula penungkapan yang dilakukan Pemda dalam *website* yang dimilikinya

H₃ : Ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pada website Pemda.

2.3.4. Kompleksitas Pemerintahan

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, jumlah penduduk mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik setiap daerah. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah maka diikuti dengan penyediaan layanan publik yang semakin besar pula, dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk mengungkapkan segala sesuatu informasi mengenai daerahnya kepada masyarakat.

Masyarakat berhak atas segala sesuatu informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan di daerahnya. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan jumlah penduduk yang besar cenderung lebih modern dan banyak mengandalkan internet untuk mendapatkan informasi termasuk informasi tentang kinerja pemerintah daerahnya (Afryansyah, 2013). Salah satunya yaitu dengan menggunakan *website* yang dimiliki pemerintah daerah.

H₄ : Kompleksitas Pemerintahan berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada website Pemda

2.3.5. Belanja Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Merujuk kepada hal ini, seharusnya semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, semakin tinggi keinginan Pemda untuk mengungkapkan informasi pelayanan dalam *website* Pemda (Puspita dan Martani, 2012).

H₅ : Belanja daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada website Pemda.